

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian mengenai evaluasi Kota Batu sebagai daerah otonomi hasil pemekaran wilayah adalah:

##### 5.1.1 Karakteristik Wilayah Kota Batu

Karakteristik wilayah Kota Batu mencakup karakteristik fisik dasar, karakteristik kependudukan dan tenaga kerja, karakteristik fisik binaan, karakteristik perekonomian dan keuangan dan karakteristik tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Batu.

##### 1. Karakteristik Fisik Dasar Kota Batu

Kota Batu terdiri dari daerah lereng/perbukitan dan daerah daratan. Luas wilayah keseluruhan Kota Batu 19.908,72 Ha dengan wilayah terluas terdapat pada Kecamatan Bumiaji yaitu 12.797,89 Ha atau sekitar 64,29% dari luas keseluruhan wilayah Kota Batu. Untuk luas wilayah efektif Kota Batu yang dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya adalah 11.466,62 Ha atau dengan kata lain 57,60 % dari total keseluruhan luas wilayah Kota Batu. Rata-rata jarak kecamatan dengan pusat pemerintahan Kota Batu adalah 3-5 km dengan rata-rata waktu tempuh 5-6 menit perjalanan.

##### 2. Karakteristik Kependudukan Kota Batu

Jumlah penduduk Kota Batu tahun 2009 adalah 206.980 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan 50,45% penduduk laki-laki Kota Batu dan 49,55% penduduk wanita. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Batu yaitu 97.881 jiwa. Struktur umur penduduk Kota Batu cenderung mengarah pada kelompok berusia produktif (15-64 tahun) yaitu sebanyak 72,03 % dari keseluruhan jumlah penduduk Kota Batu. Kota Batu memiliki tingkat kepadatan penduduk sedang yaitu 1.040 jiwa/Km<sup>2</sup> dengan tingkat kepadatan tertinggi terdapat pada Kecamatan Batu yaitu 2.153 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Berdasarkan lapangan usaha, sebagian besar tenaga kerja Kota Batu bekerja pada sektor pertanian. Jumlah tenaga kerja Kota Batu adalah 95.679 jiwa. Tenaga kerja Kota Batu sebagian besar berpendidikan SD yaitu sebanyak 30.721 jiwa. Tenaga kerja Kota Batu yang memiliki tingkat pendidikan SLTA dan S1 masing-masing sebanyak 17.410 jiwa dan 4505 jiwa. Rendahnya jenjang pendidikan tenaga kerja berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja Kota Batu yang terserap.

### **3. Karakteristik Fisik Binaan Kota Batu**

Karakteristik fisik binaan Kota Batu memaparkan pola penggunaan lahan dan sebaran fasilitas Kota Batu.

#### **a. Pola Penggunaan Lahan**

Berdasarkan data yang diperoleh, penggunaan lahan pada Kota Batu didominasi digunakan sebagai kegiatan pertanian dan hutan. Hal ini ini disebabkan pada wilayah perencanaan memiliki topografi yang berbukit dan terjal.

#### **b. Sarana permukiman**

Kualitas permukiman Kota Batu diukur dengan melihat kelengkapan sarana penunjangnya seperti penerangan listrik, air bersih, dan sanitasi. Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 55.458 kk atau 99,35% rumah tangga Kota Batu telah menggunakan sumber penerangan listrik dan sebanyak 54.999 kk atau 98,53% rumah tangga Kota Batu telah memanfaatkan fasilitas air bersih baik PDAM maupun non PDAM. Sedangkan untuk sarana sanitasi, sebanyak 48.150 kk atau 86,26% penduduk Kota Batu telah memiliki sarana sanitasi.

#### **c. Sarana pendidikan**

Pendidikan merupakan sebuah sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah sarana pendidikan Kota Batu terdapat sebanyak 133 unit sarana yang terdiri dari 84 unit SD/ sederajat, 29 unit SLTP/ sederajat, dan 20 unit SLTA/ sederajat.

#### **d. Sarana kesehatan**

Pembangunan pada sektor kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Faktor pendukung pembangunan kesehatan adalah ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Pada tahun 2009, jumlah tenaga kesehatan Kota Batu terdapat sebanyak 513 orang yang didominasi oleh perawat yaitu sebanyak 220 orang. Untuk tenaga dokter terdapat sebanyak 115 orang.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah fasilitas kesehatan yang terdapat pada Kota Batu sebanyak 238 unit baik fasilitas kesehatan berskala lokal sampai lingkungan. Fasilitas kesehatan Kota Batu didominasi oleh posyandu yaitu sebanyak 186 unit. Hal ini menunjukkan pengembangan upaya kesehatan telah dilakukan hingga skala lingkungan.

#### **e. Sarana perdagangan dan jasa**

Berdasarkan skala perdagangan, perdagangan Kota Batu didominasi oleh pertokoan sebanyak 2353 unit atau 58,69% dari keseluruhan sarana perdagangan Kota

Batu dan warung sebanyak 1.231 unit. Pada tahun 2009, jumlah lembaga keuangan Kota Batu terdapat sebanyak 185 unit dengan lembaga keuangan berupa bank sebanyak 31 unit dan lembaga keuangan bukan bank sebanyak 154 unit.

**f. Sarana peribadatan**

Berdasarkan data yang diperoleh, sarana peribadatan Kota Batu terdapat sebanyak 188 unit yang terdiri dari 139 unit masjid, 37 unit gereja, 7 unit vihara dan 2 unit pura. Sarana peribadatan Kota Batu tersebar pada seluruh kecamatan Kota Batu dengan sarana terbanyak terdapat pada Kecamatan Batu sebanyak 85 unit sarana.

**g. Sarana perhubungan**

Pembangunan infrastruktur jalan baik secara kuantitas (panjang jalan) maupun kualitas (kondisi jalan) sangat penting dalam meningkatkan kegiatan mobilisasi penduduk dan barang. Panjang jalan yang terdapat pada Kota Batu adalah 490,83 Km yang terbagi atas 19 Km jalan provinsi dan 471,83 Km jalan kota. Konstruksi jalan Kota Batu sebagian besar sudah berupa jalan aspal yaitu sepanjang 377,74 Km. Pada umumnya kondisi jalan Kota Batu tergolong cukup baik (sedang) yaitu sepanjang 241,68 Km. Jalan dengan kondisi baik terdapat sepanjang 95,83 Km dan 33,99 % dari keseluruhan panjang jalan dengan kondisi rusak.

Dalam pergerakan barang dan jasa, jumlah kendaraan bermotor Kota Batu pada tahun 2009 40.051 unit dengan tingkat kepemilikan sebanyak 38.048 kk. Banyaknya jumlah kendaraan yang terdapat pada Kota Batu berpengaruh pada aksesibilitas.

**4. Karakteristik Perekonomian dan Keuangan Kota Batu**

Sejak menjadi daerah otonom, Kota Batu bertanggung jawab penuh dalam mengelola perekonomiannya.

**a. Kemampuan keuangan**

Bentuk kemandirian Kota Batu sebagai daerah otonomi dapat dilihat dari kemampuan keuangan Kota Batu dalam hal ini penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah baik berupa bantuan maupun dana bagi hasil yang diperoleh dari provinsi. Pada tahun 2009, penerimaan daerah Kota Batu mencapai 368.477,57 juta rupiah. pendapatan daerah tertinggi Kota Batu berasal dari dana perimbangan yaitu sebanyak 285.344,17 juta rupiah atau sebesar 77,44% dari keseluruhan pendapatan daerah Kota Batu.

**b. Kemampuan ekonomi**

Pada tahun 2009, PDRB keseluruhan Kota Batu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga (ADHK) masing-masing sebesar Rp 2.655.639,11

juta dan Rp. 1.240.526,77 juta. Ditinjau dari pendekatan produksinya, sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar pada perekonomian Kota Batu berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan posisi Kota Batu sebagai daerah agrowisata dan agropolitan.

## **5. Karakteristik Tingkat Kesejahteraan Kota Batu**

Tingkat kesejahteraan Kota Batu ditunjukkan oleh besaran nilai indeks pembangunan manusia yang tercakup pada indeks harapan hidup, indeks pengetahuan dan indeks pendapatan. Berdasarkan data yang diperoleh, indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Batu pada tahun 2009 mencapai 73,74 dengan proporsi 73,20 indeks harapan hidup, 83,38 indeks pengetahuan dan 64,65 untuk indeks pendapatan. Nilai IPM yang dicapai Kota Batu menunjukkan status pembangunan manusia Kota Batu termasuk dalam kategori menengah ke atas.

### **5.1.2 Evaluasi Tingkat Kemampuan Kota Batu Sebagai Daerah Otonomi**

Evaluasi kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi hasil pemekaran dilakukan dengan menggunakan basis indikator yang terdapat pada PP no. 78 Tahun 2007. Basis indikator tersebut antara lain luas wilayah, kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali yang secara lebih rinci diuraikan dalam 35 sub indikator.

1. Berdasarkan hasil evaluasi syarat teknis, sebagian besar nilai perbandingan setiap basis indikator evaluasi Kota Batu  $> 80\%$  dari keseluruhan nilai kabupaten induk. Besaran nilai perbandingan yang diperoleh berpengaruh kepada skor yang diberikan untuk masing-masing basis indikator evaluasi PP No. 78 tahun 2007.
  - a. Indikator luas wilayah berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 mencakup luas wilayah keseluruhan dan luas wilayah efektif. Persentase perbandingan luas wilayah keseluruhan Kota Batu adalah 5,23% dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Malang. Sehingga skor yang diberikan untuk sub indikator luas wilayah keseluruhan adalah 1. Sedangkan untuk luas wilayah efektif, persentase luas wilayah efektif Kota Batu 4,14% dari luas wilayah efektif Kabupaten Malang. Sehingga skor yang diberikan adalah 1. Hal ini memperlihatkan wilayah administratif kabupaten induknya lebih luas dibandingkan Daerah Otonomi Batu.

- b. Indikator kependudukan yang tercantum dalam PP No. 78 Tahun 2007 mencakup jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Persentase perbandingan jumlah penduduk Kota Batu adalah 7,86% dari jumlah penduduk Kabupaten Malang. Sehingga skor yang diberikan untuk sub indikator jumlah penduduk Kota Batu adalah 1. Sedangkan persentase kepadatan penduduk Kota Batu adalah 206,05% dari kepadatan penduduk Kabupaten Malang. Sehingga skor yang diberikan untuk sub indikator kepadatan penduduk adalah 5. Hal ini memperlihatkan persebaran penduduk kabupaten induknya lebih banyak dibandingkan Daerah Otonomi Batu.
- c. Indikator kemampuan ekonomi mencakup PDRB non migas perkapita, pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDRB non migas. Berdasarkan hasil pengukuran, persentase PDRB non migas perkapita dan pertumbuhan ekonomi Kota Batu masing-masing sebesar 112,12% dan 123,38% dari nilai kabupaten induknya. Sehingga skor yang diberikan pada kedua sub indikator ini adalah 5. Sedangkan untuk kontribusi PDRB non migas, persentase kontribusi PDRB non migas Kota Batu pada PDRB non migas Provinsi Jawa Timur adalah 9,65% dari persentase kontribusi PDRB non migas kabupaten induknya. Sehingga skor yang diberikan adalah 1. Hal ini memperlihatkan sebagai daerah otonomi, perekonomian Kota Batu berkembang dengan baik, namun belum memberikan peranan yang cukup besar pada Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu pemerintah Kota Batu dapat mengembangkan PDRB non migas melalui potensi sumber dayanya untuk meningkatkan kontribusinya pada PDRB Jawa Timur.
- d. Indikator potensi daerah mencakup potensi fisik dan potensi non fisik wilayah. Berdasarkan hasil pengukuran, pada umumnya nilai perbandingan pada masing-masing sub indikator potensi daerah > 80% dari nilai masing-masing sub indikator kabupaten induknya. Sehingga skor yang diberikan adalah 5.
- e. Indikator kemampuan keuangan mencakup pendapatan daerah sendiri (PDS), PDS perkapita dan kontribusi PDS terhadap PDRB non migas. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah pendapatan daerah sendiri (PDS) Kota Batu adalah sebesar 21,89% dari jumlah pendapatan daerah sendiri (PDS) Kabupaten Malang. Hal ini memperlihatkan jumlah pemasukan Kota Batu untuk

membiayai belanja daerahnya lebih kecil dibandingkan pada kabupaten induknya. Sehingga nilai yang diberikan adalah 2.

Dan rasio PDS perkapita Kota Batu dan rasio PDS terhadap PDRB Non Migas Kota Batu masing-masing sebesar 256,44% dan 229,16% dari rasio PDS perkapita Kota Batu dan rasio PDS terhadap PDRB Non Migas kabupaten induknya. Hal ini memperlihatkan rata-rata pemasukan penduduk Kota Batu dan kontribusi masing-masing sektor non migas untuk pendapatan daerah Kota Batu lebih besar dibandingkan kabupaten induknya. Sehingga skor yang diberikan pada kedua sub indikator ini adalah 5.

f. Indikator sosial budaya mencakup rasio sarana peribadatan, rasio sarana olahraga dan jumlah balai pertemuan. Berdasarkan hasil perhitungan, persentase rasio sarana peribadatan dan rasio sarana olahraga Kota Batu masing-masing sebesar 89,87% dan 29,86% dari nilai rasio Kabupaten Malang. Sehingga skor yang diberikan pada masing-masing sub indikator adalah 5 dan 2. Sedangkan persentase jumlah balai pertemuan Kota Batu adalah sebesar 20% dari jumlah balai pertemuan yang terdapat pada Kabupaten Malang. Sehingga skor yang diberikan adalah 1. Hal ini memperlihatkan sebaran sarana peribadatan, sarana olahraga dan balai pertemuan kabupaten induknya daerah otonomi lebih banyak dibandingkan Kota Batu.

g. Indikator sosial politik mencakup rasio penduduk dalam kegiatan pemilihan legislatif dan jumlah organisasi masyarakat. Berdasarkan hasil perhitungan, persentase rasio penduduk dalam kegiatan pemilihan legislatif kota Batu adalah 108,20% dari persentase Kabupaten Malang. Hal ini memperlihatkan partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada kegiatan pemilu legislatif Kota Batu lebih banyak dibandingkan kabupaten induknya Sehingga skor yang diberikan pada kedua sub indikator ini adalah 5.

Dan persentase jumlah organisasi kemasyarakatan Kota Batu adalah 6,40% dari jumlah organisasi kemasyarakatan Kabupaten Malang. Hal ini menggambarkan keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai media kegiatan sosial masyarakat lebih banyak pada kabupaten induk daerah otonomi dibandingkan Kota Batu. Sehingga skor yang diberikan untuk sub indikator ini adalah 1.

h. Indikator pertahanan mencakup rasio aparat pertahanan dan karakteristik wilayah menurut sudut pandang pertahanan. Persentase rasio aparat pertahanan Kota Batu 116,36% dari rasio aparat pertahanan Kabupaten Malang. Hal ini memperlihatkan ketersediaan aparat pertahanan Kota Batu lebih tercukupi dibandingkan kabupaten induknya. Sehingga skor yang diberikan untuk rasio aparat pertahanan Kota Batu adalah 5.

Berdasarkan tingkatan karakteristik wilayah yang tercantum dalam PP No. 78 Tahun 2007, kedudukan wilayah Kota Batu dan Kabupaten Malang adalah sama. Sehingga skor yang diberikan untuk sub indikator ini adalah 5.

i. Indikator keamanan mencakup rasio aparat keamanan. Persentase rasio aparat keamanan Kota Batu 75,76% dari nilai rasio kabupaten induknya. Hal ini memperlihatkan ketersediaan aparat keamanan kabupaten induk daerah otonomi lebih baik dibandingkan Kota Batu. Sehingga skor yang diberikan pada sub indikator rasio aparat keamanan adalah 4.

j. Indikator kesejahteraan masyarakat ditunjukkan oleh indeks pembangunan manusia. Berdasarkan hasil pengukuran, persentase indeks pembangunan manusia Kota Batu adalah 105,52% dari nilai indeks pembangunan Kabupaten Malang. Hal ini memperlihatkan tingkat kesejahteraan penduduk Kota Batu lebih baik dibandingkan kabupaten induknya. Sehingga skor yang diberikan pada sub indikator ini adalah 5.

k. Indikator rentang kendali mencakup rata-rata jarak dan rata-rata waktu tempuh menuju pusat pemerintahan. Berdasarkan hasil pengukuran, persentase kedua sub indikator ini masing-masing sebesar 14,87% dan 16,41% dari nilai kabupaten induknya. Hal ini memperlihatkan jarak tempuh dan waktu tempuh masing-masing kecamatan menuju pusat pemerintahan Kota Batu lebih efektif dan efisien dibandingkan jarak masing-masing kecamatan menuju pusat pemerintahan kabupaten induknya. Sehingga nilai yang diberikan pada kedua sub indikator ini adalah 1.

2. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai total keseluruhan basis indikator Kota Batu adalah 346. Dan sesuai dengan rentang kelulusan yang tercantum dalam PP No. 78 Tahun 2007, nilai total keseluruhan indikator evaluasi PP No. 78 Tahun 2007 Kota Batu berada pada rentang 340s/d491 yang berarti bahwa Kota Batu **MAMPU** sebagai daerah otonomi hasil pemekaran wilayah.

Hal ini juga memperlihatkan Kota Batu tetap mampu sebagai daerah otonomi baru meskipun hanya dibandingkan dengan kabupaten induknya yang memiliki tipologi atau karakteristik wilayah yang berbeda.

3. Berdasarkan syarat fisik kewilayahan, Kota Batu belum memenuhi syarat sebagai daerah otonomi sesuai PP No. 78 Tahun 2007. Hal ini dikarenakan pada saat pembentukan daerah otonomi Kota Batu mengacu pada PP No. 129 Tahun 2000 yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan daerah otonomi. Untuk itu diperlukan adanya penambahan wilayah administrasi Kota Batu sebagai penyempurnaan dan pemenuhan syarat administrasi yang tercantum dalam PP No. 78 Tahun 2007 yaitu daerah otonomi yang terbentuk minimal terdiri dari 4 kecamatan

### 5.1.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian hasil evaluasi kemampuan Kota Batu dan hasil pembahasan karakteristik wilayah Kota Batu terkait komponen evaluasi PP No. 78 Tahun 2007, disusun rekomendasi yang terfokus pada hal-hal yang harus dikejar Kota Batu untuk meningkatkan kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi. Adapun rekomendasi tersebut antara lain:

1. Peningkatan PDRB non migas melalui pemanfaatan potensi sektor basis Kota Batu yaitu sektor pariwisata melalui sektor jasa dan sektor perdagangan, hotel, dan restaurant.
2. Penambahan jumlah wilayah administrasi Kota Batu sesuai syarat fisik kewilayahan yang tercantum dalam PP no. 78 Tahun 2007 .
3. Peningkatan pelayanan publik sesuai dengan tujuan PP No 78 Tahun 2007, yang dapat dilakukan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang tersebar pada masing-masing kecamatan Kota Batu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Batu.
4. Peningkatan balai pertemuan umum direkomendasikan diutamakan pada Kecamatan Batu dan Kecamatan Bumiaji.

### 5.2 Saran

Saran yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi Kota Batu sebagai daerah otonomi hasil pemekaran wilayah adalah sebagai berikut:

### **A. Bagi Pemerintah**

- Diperlukan adanya penyesuaian persyaratan dengan yang tercantum dalam peraturan terbaru yaitu PP No. 78 Tahun 2007 untuk pemerintah daerah otonomi baru yang terbentuk dengan peraturan lama yaitu PP No. 129 tahun 2000.
- Diperlukan adanya penambahan wilayah administrasi oleh pemerintah Kota Batu sesuai dengan syarat fisik kewilayah PP No. 78 Tahun 2007.
- Diperlukan adanya peningkatan pembangunan fasilitas pelayanan publik oleh pemerintah Kota Batu yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan publik Kota Batu.
- Diperlukan adanya peningkatan PDRB non migas melalui potensi sektor basis Kota Batu dan pengembangan sektor-sektor pendukung potensi sektor basis Kota Batu. Sehingga terjadi peningkatan nilai tambah PDRB non migas Kota Batu dan kontribusinya pada PDRB non migas Provinsi Jawa Timur dan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam pembelanjaan daerah.

### **B. Bagi Masyarakat Kota Batu**

- Diperlukan adanya perhatian dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya Kota Batu sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Batu.

### **C. Bagi Akademisi (Penelitian)**

- Pada penelitian ini, evaluasi yang dilakukan hanya membandingkan kemampuan daerah otonomi dengan kabupaten induknya. Hal ini menjadi keterbatasan penelitian ini dan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan evaluasi dengan membandingkan kota yang setara dengan Kota Batu (daerah kontrol) baik yang berada pada Provinsi Jawa Timur dan atau di provinsi sekitar wilayah Jawa Timur yang sedang berkembang sesuai dengan persyaratan metode perhitungan yang tercantum dalam PP No 78 Tahun 2007.
- Pada penelitian ini, metode perhitungan yang dilakukan hanya menggunakan metode rata-rata pembanding. Untuk penelitian selanjutnya, menggunakan pendekatan metode perhitungan dengan metode kuota.
- Pada penelitian ini pendekatan variabel evaluasi yang digunakan adalah dengan menggunakan basis indikator yang terdapat pada PP No. 78 Tahun

2007. Variabel-variabel indikator yang terdapat pada PP No. 78 Tahun 2007 belum secara rinci dapat menggambarkan tingkat kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi secara keseluruhan. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan penambahan variabel indikator yang lebih rinci atau dengan menggunakan pendekatan evaluasi lain.

- Pada penelitian ini, hanya dirumuskan rekomendasi peningkatan kemampuan Kota Batu. Untuk penelitian selanjutnya dapat disusun strategi pengembangan Kota Batu untuk meningkatkan kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi.
- Pada penelitian ini tidak melihat perkembangan Kota Batu sebagai daerah otonomi (sebelum dan sesudah pemekaran). Sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat dikaji mengenai perkembangan Kota Batu untuk mengetahui tingkat perubahan Kota Batu dari sebelum dimekarkan hingga sesudah pemekaran.

